

EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN BERBASIS
KINERJA PADA DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Oleh :

Almasdi, SE, M.Si¹⁾

¹⁾ Dosen Tetap PNSD Dpk, Jurusan Manajemen STIE Haji Agus Salim Bukittinggi

Abstraction

Region autonomy era has brought some important changing during the region government implementation in Indonesia. UU number 22 in 1999 has covered it about the financial balancing between center government and region government that letter on revised by UU number 32 and 33 in 2004 thought the explanations in government's rules number 105 in 2000. One of them is the implementation of the new paradigm in handling region budget from the conventional approach through the incremental sistem and the line item to the budgeting approach based on the activity that is oriented toward the output and outcome from the budget users.

Bukittinggi government is one of the areas that firstly has implemented the budgeting approach based on the activity in arranging the APBN beginning exactly in 2002 until now. The research aims to know the effectively rate and the realization efficiency in some institutions in Bukittinggi government environments.

After using the Cost of Collection Efficiency Ratio approach and Change Performance Index approach, the research has gotten the result based on the observation toward six institutions including one BUMN (PDAM) from ten institutions in Bukittinggi government environments where the Region Income Official and Industry, Trade, and Economic Enterprise Official is the official that really effective and efficient in using the given budget. Besides, since this approach is implemented by Bukittinggi Government, there is the improvement of the activity (effectively and efficiency improvement) toward the fund using of APED of the official that observed from year to year. Based on this fact, Bukittinggi can be a reference to other Region governments to improve the activity.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Undang Undang No.22 dan No. 25 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, Pemerintah berusaha menjabatani tuntutan masyarakat dalam pengelolaan anggaran yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik dengan menggunakan pendekatan kinerja. Penekanan pertanggung-jawaban tidak sekedar pada *input* tetapi juga pada *output* dan *outcome*. Dengan demikian anggaran daerah tidak hanya menggam-

barkan kondisi keuangan daerah yang meliputi informasi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, tetapi juga berfungsi sebagai *managerial plan for actions* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Sistem manajemen dalam penerapan anggaran kinerja merupakan sistem yang dianggap lebih baik dari sistem anggaran sebelumnya, karena dari pelaksanaannya dan hasil pengukurannya bahwa setiap pengeluaran akan dapat ditentukan nilai prestasi yang harus dicapainya. Jumlah anggaran dan dalam pencapaian target

dapat diperhitungkan, ditetapkan secara akurat dan jelas, sesuai dengan besarnya penentuan target yang ingin dicapai, selain dalam proses pengerjaannya setiap bagian yang mempunyai wewenang dalam pemerintahan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penetapan anggaran tersebut dapat disesuaikan dengan rencana, yang ingin dicapai, sehingga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan anggaran langsung dapat diukur. Dan proses kinerja pemerintah dapat berangsur lebih baik, bersih dan bertanggung jawab. Itulah yang merupakan indikator utama mengapa sistem anggaran kinerja dianggap lebih baik dari sistem anggaran sebelumnya.

Berkaitan dengan hal di atas, Pemerintah Kota Bukittinggi telah berupaya untuk secepatnya melaksanakan perubahan-perubahan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tercermin pada proses penyusunan APBD Tahun 2002 yang telah mengarah pada sistem penganggaran yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja (*performance based sistem*) dari yang selama ini didasarkan pada sistem *line item* dan *incremental*.

Disamping itu kelembagaan Pemerintahan Kota Bukittinggi harus disusun dengan struktur yang lebih ramping dan kaya fungsi, dengan pendayagunaan yang optimal dari seluruh sumber daya aparatur Pemerintah yang ada di lingkungan wilayah administratif Kota Bukittinggi, yang saat ini telah terbentuk dan terdiri atas : *sate secretariat* (tiga asisten dan sembilan bagian); tiga Badan dan lima kantor. Semuanya ini memerlukan dana operasional yang cukup dalam memfasilitasi kebutuhan rutin operasional.

Kota Bukittinggi melayani *Publik Eksternal*, antara 200% s.d 300% lebih besar dari pelayanan *public* internalnya. Kondisi umum penduduk yang sekitar 100 ribu jiwa (dimalam hari) tenggelam dalam keramaian dan kesibukan aktivitas *public* layanan sosial, ekonomi, bisnis dan wisata lokal/regional siang harinya; yang keramaiannya sampai 250 s.d 320 ribu jiwa di siang hari, terutama pada hari-hari pasar dan libur.

Berangkat dari kondisi objektif tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem anggaran yang berbasis kinerja yang diduga hasilnya bervariasi dari tiap Dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran yakni dengan *methods cost of collection efficiency ratio* (CCER), yaitu dengan membandingkan total pembiayaan/belanja dengan realisasi PAD, apabila hasil rasio tersebut besar, sama atau kecil dari satu akan menunjukkan tingkat efisiensi. Bila $CCER > 1$, tingkat efisiensi tinggi, sebaliknya bila $CCER < 1$, maka tingkat efisiensi rendah. Metoda ini digunakan untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaan penggunaan anggaran. Dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan diukur dengan *Change Performance Index* (CPI), yaitu merupakan perbandingan/rasio realisasi penerimaan PAD dengan sasaran target penerimaan PAD yang direncanakan bila hasilnya rasio tersebut, $< 40\%$ dikategorikan sangat tidak efektif; antara $40\%-60\%$ dikategorikan tidak efektif; bila antara $60\%-80\%$ dapat dinyatakan cukup efektif dan antara $80\%-100\%$ dikategorikan efektif.

Pada Pemerintah Kota Bukittinggi terdapat 10 (sepuluh) instansi pelaksana Pemerintahan atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) (lakip 2006) dalam tingkat Dinas dan kantor, namun dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, maka penelitian ini difokuskan hanya 4 (empat) Dinas dan 1 (Satu) instansi berupa BUMD, yakni PDAM Kota Bukittinggi.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan utama dari penerapan sistem anggaran kinerja adalah bagaimana mengukur pelaksanaan dari sebuah program kerja dikaitkan dengan penggunaan dana yang dialokasikan dengan outcome yang dicapai. Dengan menggunakan pendekatan *Change Performance Index* (CPI) yang bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas dari Dinas diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada tabel 1. dibawah ini :

Tabel 1.
Tingkat Efektivitas Kinerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Dengan Sistem Anggaran Kinerja (dalam %)

No	DINAS	2003	2004	2005	2006
1	Dispenda	78,65	89,76	96,52	98,49
2	Kesehatan	65,84	75,36	87,25	88,43
3	Pariwisata	71,22	72,44	89,82	90,00
4	Pertanian	55,65	63,91	64,46	66,05
5	Perindagkop	77,55	82,34	92,00	93,21
6	PDAM	54,46	55,25	62,20	65,63

Dari tabel. 1. di atas terlihat bahwa dari 6 (enam) Dinas yang diteliti di lingkungan Pemerintahan Kota Bukittinggi, secara keseluruhan semenjak dimulainya penerapan Sistem Anggaran Kinerja tahun 2002 hingga saat ini, terdapat peningkatan efektivitas dari kinerja pada setiap Dinas tsb. Dan pada tahun 2006 Dinas yang paling dinilai efektif dalam melaksanakan program-program kerja dengan penggunaan anggaran daerah dalam pencapaian target dari sasaran yang telah

ditetapkan yaitu Dinas Dispenda dan Dinas Perindagkop, disusul Dinas Pariwisata.

Dan bila dilihat dari sisi tingkat efisiensi dalam penggunaan dana dengan menggunakan pendekatan *cost of collection efficiency ratio*, maka diperoleh tingkat efisiensi dari setiap sektor/dinas yang diamati sebagaimana tergambar pada tabel. 2. berikut :

Tabel 2.
Tingkat Efisiensi Kinerja Dinas Di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Dengan Sistem Anggaran Kinerja

No	DINAS	2003	2004	2005	2006
1	Dispenda	0,51	1,52	1,58	1,59
2	Kesehatan	0,24	1,00	1,25	1,32
3	Pariwisata.	0,65	0,97,	1,34	1,36
4	Pertanian	0,43	1,23	1,33	1,34
5	Perindagkop	0,67	0,95	1,23	1,26
6	PDAM	0,41	0,43	0,59	0,83

Dari tabel. 2. di atas terlihat pada saat awal sistem anggaran kinerja dilaksanakan, dan dalam periode 2002-2006, terlihat bahwa dinas yang memiliki tingkat efisiensi yang cukup tinggi berturut-turut adalah Dinas Pendapatan Daerah, diikuti oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Masing-masing sebesar 0,65 dan 0,67%.

Tetapi tingginya angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan prestasi lebih dari dinas lainnya, karena bisa jadi pengeluaran atau pemanfaatan anggaran yang telah disediakan yang dilakukan nilainya lebih sedikit dibandingkan dari dinas yang lain. Namun bila diamati kepada tingkat efektivitas yang tergambar pada table. 1. di atas, dinas ini juga tergolong yang memiliki tingkat efektivitas yang tinggi.

Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2003 dan 2004, ternyata kedua dinas di atas justru ditinggalkan oleh dinas yang sebelumnya memiliki indeks yang rendah. Terlihat terdapat bahwa dinas yang berhasil meningkatkan tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran, demikian juga dilihat dengan angkat tingkat efektivitasnya. Pada tahun 2004, hampir semua dinas telah berhasil meningkatkan tingkat efisiensi, kecuali dinas PDAM.

PENUTUP

Berdasarkan temuan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi sudah cukup berhasil meningkatkan kinerja setiap dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kota dengan dilaksanakannya atau diterapkannya Sistem Anggaran Kinerja ini. Prestasi ini dicapai dalam waktu yang relatif cepat, yakni dalam dalam masa 3 (tiga) tahun saja

program kerja yang berbasis kinerja tersebut dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi yang notabene merupakan Pemerintahan Daerah Pertama yang melaksanakan sistem anggaran kinerja ini di Sumatera Barat bersamaan dengan Pemerintahan Kabupaten Solok, melihat kepada hasilnya, menggambarkan bahwa pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dengan sistem anggaran kinerja ini jauh lebih baik dari sistem anggaran konvensional atau berimbang yang selama ini dilaksanakan oleh semua pemerintahan daerah.

Dengan demikian, pelaksanaan sistem anggaran ini Pemerintahan Kota Bukittinggi telah menjadi dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi setiap daerah lainnya untuk melaksanakan sistem yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul, 2004, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Pemko Bukittinggi, 2001, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi, no. 1 Tentang Renstrada Kota Bukittinggi tahun 2001-2005
- Depkeu RI, 2003, Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, Jakarta